

Tata Kelola Keuangan Yang Transparan dan akuntabel kepada Anggota Karang Taruna

Krisnaldy; Sulaiman; Bulan Oktrima ;

Universitas Pamulang
dosen01890@unpam.ac.id; dosen01902@unpam.ac.id;
Dosen00790@unpam.ac.id ,

Abstrak

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada para warga terutama di Kelurahan Rengasbekerja sama dengan para Dosen Universitas Pamulang. Metode kegiatan yang digunakan yaitu tim pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengunjungi kelurahan. Tahap berikutnya yaitu tahap pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tahap ini akan diberikan penyuluhan dan pelatihan kepada warga sekitar. Penyuluhan dan pelatihan yang diberikan tentang bagaimana mengelola Keuangan secara efektif dan efisien. Untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan efisiensi SDM. Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bertambahnya keilmuan dan keterampilan masyarakat terutama di Benda Baru, khususnya bagaimana meningkatkan mutu pengelolaan Keuangan yang efektif dan efisien

Kata Kunci: penyuluhan, pengelolaan, Keuangan, efisiensi, inovatif.

Abstract

The purpose of this community service activity is to provide counseling and training to residents in collaboration with Pamulang University lecturers. The activity method used is the implementation team of Community Service activities to visit the sub-district. The next stage is the stage of implementing Community Service activities. This stage will provide counseling and training to local residents. Counseling and training provided on how to manage finances effectively and efficiently. To be able to improve the quality of management and financial efficiency. The result of this Community Service activity is the increase in knowledge and skills of the community, especially youth organizations in West Pamulang, in particular how to improve the quality of effective and efficient financial management.

Keywords: counseling, management, finance, efficiency, innovative.

PENDAHULUAN

Berpijak pada gagasan membentuk sebagai alternatif, membuat pola pembangunan dengan melalui pemberdayaan . Maka pada hakekatnya sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dikembangkan sebagai Infra Struktur sosial di pedesaan/kelurahan. Sebagai infra struktur sosial, maka seharusnya

posisi dapat dianggap sebagai partner Pemerintah untuk mengembangkan pembangunan pedesaan. Infra struktur sosial mempunyai misi membawakan aspirasi masyarakat untuk menyuarakan pembangunan. Suara pembangunan akan semakin padu dan bulat manakala peranan pemerintah (supra struktur) dan sebagai

infra struktur sosial seiring seirama jalannya.

Profesionalisme sangat dituntut sebagai organisasi Infra struktur sosial karena peranan dan fungsinya sebagai pelayan pembangunan dianggap sangat strategis. Kiranya tidak menutup mata bahwa masih banyak kondisi yang belum memenuhi persyaratan profesional. Pada kenyataan, kualitas pada saat ini sebagian besar pada klasifikasi tumbuh sebagian lagi berkembang. Oleh karena itu Pemerintah Daerah di dalam fungsinya sebagai pembina teknis utama dan dinas/instansi lain sebagai pembina teknis, mempunyai kewajiban untuk meningkatkan secara terus menerus kualitas . Upaya peningkatan kualitas harus diimbangi oleh dalam memotivasi untuk mengembangkan peranan dan fungsinya secara optimal agar tercapai desa . Adapun langkah yang harus ditempuh antara lain :

1. Penataan management organisasi;
 2. Menumbuhkan dan mengembangkan kader-kader profesional;
 3. Penguasaan teknologi pedesaan;
 4. Peningkatan dan pengembangan program kegiatan.
1. **A. Penataan Management Organisasi sebagai langkah nyata untuk menjawab tantangan persoalan organisasi. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :**
2. Konsolidasi Organisasi;
 3. Tatanan/mechanisme organisasi yang terarah pada pengembangan Pokja-pokja;
 4. Peningkatan koordinasi dan komunikasi;
 5. Penataan administrasi yang lebih tertib.

Ruang lingkup penataan management proses organisasi hendaklah berjalan searah dengan pembangunan, dimana tiap-tiap desa akan mempunyai karakter-karakter yang berbeda. Dengan demikian warna dan corak penataan management akan berbeda satu sama lainnya.

Peningkatan dan Pengembangan Program Kegiatan

Yang dimaksud peningkatan dan pengembangan program kegiatan, adalah program yang banyak terkait dengan program pembangunan kelurahan/pedesaan. Sementara itu kita ketahui bahwa pembangunan dari tahun ke tahun semakin berfariasi dan kompleks, terutama bila dikaitkan dengan pemecahan permasalahan-permasalahan pembangunan.

Upaya yang paling tepat yang harus dilaksanakan adalah menyesuaikan program-programnya sesuai dengan bentuk dan warna program pembangunan. Gambaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan dan LP3M, hendaknya tercermin juga pada program . Oleh sebab itu diharapkan aktif ke dalam proses perencanaan dan proses pelaksanaan pembangunan.

Indikasi keterlibatan dalam proses pembangunan menuju akan terlihat demi kegiatan-kegiatan Pokja-pokja yang dibentuk dan dikembangkan berdasarkan pada kepentingan-kepentingan pembangunan. Semakin luas pokja yang dikembangkan semakin menunjukkan berperan aktif di dalam pembangunan.

TUGAS FUNGSI

Sesuai Pedoman Dasar , pengertian adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan

berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Pembinaan diatur dalam Permensos 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar . Berikut kutipan isi pedoman:

Tujuan

Tujuan adalah :

1. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga dalam mencegah, menagkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.
2. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga yang Trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan.
3. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga .
4. Termotivasinya setiap generasi muda warga untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Terjalinnnya kerjasama antara generasi muda warga dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
6. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya.
7. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

Fungsi

Setiap melaksanakan fungsi :

1. Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial.
2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat.
3. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.
4. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.
5. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.
6. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.
8. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi social bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

9. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.
10. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

PEMBERDAYAAN DENGAN PROGRAM LPM

merupakan wadah pembinaan generasi muda yang berada di Desa atau Kelurahan dalam bidang Usaha Kesejahteraan Sosial. Sebagai wadah pembinaan tentu saja mempunyai beberapa program yang akan dilaksanakan yang melibatkan seluruh komponen dan potensi yang ada di Desa atau Kelurahan yang bersangkutan. Sebagai Lembaga atau Organisasi yang bergerak di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan berfungsi sebagai subyek, sepatutnya mungkin mampu menunjukkan fungsi dan peranannya secara optimal.

Sebagai organisasi tentunya harus memiliki susunan pengurus dan anggota yang lengkap dan masing-masing anggota dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan bidang tugasnya serta dapat bekerja sama dengan didukung oleh administrasi yang tertib dan teratur. Memiliki program kegiatan yang jelas sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada disekitarnya Program Kegiatan belansung secara melembaga terarah dan berkesinambungan serta melibatkan seluruh unsur generasi muda yang ada.

Kemampuan untuk menghimpun dana secara tetap baik yang bersumber dari Pemerintah maupun swadaya masyarakat untuk pelaksanaan program masyarakat kegiatannya harus memiliki sarana

prasarana yang memadai baik secara tertulis maupun administrasi Keberadaan harus mampu menunjukkan peran dan fungsinya secara optimal di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat memberikan legitimasi dan kepercayaan kepada komponen-komponen yang lain yang sama-sama berpartisipasi dalam Pembangunan Desa atau Kelurahan khususnya pembangunan dalam bidang Kesejahteraan Sosial, salah satu komponen yang berperan dalam pembangunan Desa atau Kelurahan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

LPM bersama-sama dengan komponen-komponen yang lain sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya berkepentingan membangun Desa atau Kelurahan masing-masing. Mengetahui bahwa LPM sebagai lembaga masyarakat yang mewadahi segenap aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa atau Kelurahan secara menyeluruh (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Pertahanan dan Keamanan) dan mempunyai tugas yang menyelenggarakan musyawarah Desa atau Kelurahan maka sebagai salah satu bagian dari partisipasi pembangunan bidang kesejahteraan sosial akan selalu koordinasi, konsultasi, koreksi dan memberikan kritik atau saran maupun bentuk yang lain dengan LPM.

Pemberdayaan dengan program LPM dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Telah diketahui bersama bahwa sebagai organisasi sosial kepemudaan yang ada di Desa atau Kelurahan mempunyai tugas pokok yaitu : bersama-sama pemerintah menangani permasalahan sosial (Pembangunan dibidang Kesejahteraan

Sosial). Sebagai organisasi mempunyai program yang disesuaikan dengan kepentingan atau keadaan masyarakat Desa atau Kelurahan masing-masing.

Dalam program atau kegiatan yang dilaksanakan LPM dan setelah dicermati, dikaji dan dipahami maka dapat ditarik suatu garis kerjasama koordinasi, saling mengisi, saling mendukung dan saling sumbang saran dengan program atau kegiatan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat khususnya generasi muda, bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, program-programnya akan dilaksanakan bersama-sama membahu pemerintah dalam pembangunan di Desa atau Kelurahan meskipun kosentrasinya pada Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial..

Sesuai dengan kondisi masing-masing nya. diharapkan mampu menyikapi dan menangani berbagai permasalahan kesejahteraan sosial para pemuda dan warga masyarakat umumnya, LPM sebagai wahana partisipasi masyarakat (salah satunya) akan selalu memberikan spirit, dorongan dan membantu pembangunan melalui program-program yang telah direncanakan . Dengan bekal kemampuan dan kemapanan yang optimal, akan mampu secara maksimal menangani permasalahan kesejahteraan sosial, sehingga permasalahan sosial yang ada di Desa atau Kelurahan akan menjadi berkurang atau hilang. Dengan demikian LPM mampu memberikan kontribusi kepada secara optimal melalui program-programnya dan masyarakat sendiri merasakan dampaknya yaitu permasalahan sosial berkurang, kesejahteraan sosial meningkat dan kesetiakawanan sosial maupun kebersamaan sosial menjadi kental.

Beberapa program UKS yang dapat dikontribusikan dengan lembaga atau organisasi lain dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, antara lain: Pencegahan atau preventif terhadap tumbuhnya kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan lain-lain melalui kegiatan olah raga, kesenian dan rekreasi dll. Pelayanan dan rehabilitasi sosial antara lain :kebersihan lingkungan, penyantunan para penyandang cacat anak terlantar secara rujukan maupun langsung, penyantunan para korban bencana dan lain-lain. Pengembangan melalui kerjasama dengan organisasi sosial yang ada, pembentukan Kelompok Usaha Bersama, ketrampilan ekonomi produktif dll. Kependudukan dan lingkungan hidup, kesehatan dan gizi, KB, pertanian dll. Program-program tersebut bersifat fleksibel (dapat berubah), mengembangkan dan tuntas tanpa menimbulkan akses-akses negatif. Adapun fungsinya antara lain : sebagai pencegahan, rehabilitasi, pengembangan dan penunjang. Selain dari program , banyak kegiatan yang dapat diprogramkan untuk membangun Desa atau Kelurahan khususnya pada bidang kesejahteraan sosial. Pemberdayaan Fakir Miskin merupakan komitmen bersama seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Paradigma pemberdayaan dalam pengentasan fakir miskin merupakan pergeseran cara pandang terhadap fakir miskin sebagai obyek pembangunan selama ini. Ditengah segala keterbatasannya, kita semua menyadari bahwa Fakir Miskin adalah juga manusia yang memiliki berbagai potensi untuk dapat dikembangkan dan diberdayakan, paling tidak *"agar mereka dapat menolong diri mereka sendiri"*, sebagaimana prinsip yang sering dikembangkan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Solidaritas sosial yang tinggi, mobilitas yang tinggi, keuletan, dan orientasinya kemasa depan yang cukup kuat, merupakan diantara sekian potensi yang masih dimiliki oleh Fakir Miskin. Implementasinya tentu disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Karena berdasarkan wilayahnya, program pemberdayaan fakir miskin dikonsentrasikan berdasarkan karakteristik yang terbagi kedalam: wilayah hutan kemasyarakatan, wilayah pedesaan (termasuk daerah pertanian dan pegunungan), wilayah desa-kota (sub urban, termasuk kawasan industri), wilayah perkotaan, wilayah pesisir/pantai, wilayah kepulauan terpencil, wilayah perbatasan antarnegara, wilayah eks korban bencana alam, dan wilayah eks korban bencana sosial.

. Hal itu juga mengingat keberadaan yang tumbuh dan berkembang di hampir seluruh desa/kelurahan di Indonesia baik wilayah pedesaan, pesisir, hutan kemasyarakatan, industri, maupun eks korban bencana. Berikut ini beberapa istilah yang berhubungan dengan implementasi :

1. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat agar mereka dapat mengatasi ataupun menangani dengan baik permasalahan ataupun tantangan kehidupan yang sedang ataupun akan mereka alami.
2. Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan sosial ekonomi dari anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan peningkatan akses terhadap pelayanan sosial dasar dengan mendayagunakan sumber-sumber sosial yang ada di masyarakat.
3. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (PP 42/1981).
4. Usaha Ekonomis Produktif (UEP) adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
5. Kewirausahaan adalah suatu usaha bisnis ekonomi berdasarkan tujuan dan sistematis tertentu yang dimulai dengan skala usaha kecil dan dengan menggunakan analisis "peluang", konseptual, inovasi, dan mengarah pada pemberian contoh berdasarkan falsafah kepemimpinan.
6. Pendamping adalah seorang, sekelompok orang atau kumpulan orang dalam lembaga yang memiliki kompetensi di bidang usaha kesejahteraan sosial dan usaha ekonomis produktif melalui program peningkatan kemampuan ekonomi yang meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
7. Pendampingan sosial adalah proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan kelompok masyarakat yang tergabung dalam program tertentu dan masyarakat

sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Dengan paradigma pembangunan saat ini yang menempatkan manusia sebagai sumberdaya potensial, maka sesungguhnya pembangunan menghadapi tantangan nyata dalam bentuk upaya-upaya konstruktif kearah pemberdayaan sumberdaya potensial tersebut untuk menjadi sumberdaya yang aktual dan konkrit. Umumnya masyarakat kita di desa/kelurahan adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan ketrampilan mengelola sumber daya alam, modal, dan teknologi, disamping sebagian lainnya juga memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengorganisir.

Potensi ini juga tidak terkecuali ada di kalangan generasi mudanya, . Peningkatan keahlian dan ketrampilan Keuangan di desa/kelurahan sejatinya juga dapat dikembangkan diluar jalur formal. Berbagai pelatihan bagi masyarakat di desa/kelurahan dapat dikembangkan dengan harapan mampu menghasilkan tenaga kerja dan Keuangan yang berkualitas. Dengan memberdayakan dan mengembangkan melalui berbagai pendekatan programnya, terutama untuk menjadi pendamping bagi pemberdayaan fakir miskin, akan dapat diwujudkan masyarakat dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam arti mampu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi sendiri.

Sumberdaya yang sangat potensial dalam akselerasi pembangunan dengan tingkat kesejahteraan yang meningkat adalah kelembagaan sosial yang berdaya, memiliki pengetahuan dan pemahaman, berpikir kritis, dan memiliki solusi bagi setiap permasalahan masyarakatnya. Bagaimanapun dan berapapun banyaknya kekayaan alam dan jumlah penduduk yang tersedia, jika kualitas manusia dan kelembagaan sosialnya kurang, maka menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Sedangkan modal dan teknologi akan tergantung pada cara manusia membuat keterkaitan dan keserasiannya dengan faktor tenaga manusia itu sendiri.

Melalui bimbingan dan pendampingan dari diharapkan sumberdaya manusia potensial dari kalangan fakir miskin dapat diwujudkan menjadi KEUANGAN yang aktual dan potensi ekonomi desa/kelurahan dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah. Program Pendampingan oleh dimaksudkan untuk menjembatani pemerataan tenaga sosial (*Volunteer*) yang bertugas mendampingi pemberdayaan fakir miskin diseluruh desa/kelurahan di Indonesia, dalam rangka ikut memecahkan masalah kemiskinan di tanah air. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai adalah mendampingi dan memberdayakan kelompok-kelompok usaha masyarakat fakir miskin dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan, sekaligus dalam kerangka menggerakkan potensi desa dalam mengatasi masalah-masalah krisis ekonomi, khususnya pangan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu tahap survei yaitu sosialisasi dilakukan dengan menyusun berbagai hal

yang akan disampaikan pada saat kegiatan pengabdian yang akan dilakukan yang meliputi: penyusunan materi yang akan diberikan, penyusunan jadwal pemberian materi, pembagian tugas tim pengabdian dan survei ke lokasi pengabdian. Tahap sosialisasi yaitu sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan tahap sosialisasi yaitu melakukan silaturahmi dengan ketua yayasan, menyampaikan maksud dan tujuan pengabdian ini. Pada tahap ini juga dilakukan jalinan kerjasama dan menentukan jadwal kegiatan pengabdian. Tim pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah dosen Fakultas Ekonomi jurusan manajemen sebanyak 5 orang. Tim pengabdian memberikan materi kepada Kelurahan Pamulang Barat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pamulang yang dilakukan oleh dosen-dosen program studi Manajemen telah berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan hangat dari tempat pelaksanaan kegiatan ini

Harapan kami dengan pengabdian ini dapat membuka wawasan masyarakat yang diperoleh adalah bertambahnya keilmuan bagi para Masyarakat dan Ilmu yang diperoleh pada Pengabdian Masyarakat kali ini diharapkan mampu memberikan semangat baru bagi kita dalam menyampaikan materi dan motivasi serta berkontribusi bagi generasi muda, baik di lingkungan sekolah, kampus

Foto Kegiatan PKM



FTAR PUSTAKA

Batubara, R. (2002). Pemanfaatan Bambu di Indonesia. Medan: USU Digital Library.
Berlian, V. A. N. dan Estu R. (1995). Jenis dan Prospek Bisnis Bambu. Jakarta: Penebar Swadaya.
Choirumuddin. (2007). Mari Membuat Anyaman Bambu. Jakarta: Tropica.

Duryatmo, S. (2000). Wirausaha Kerajinan Bambu. Jakarta: Puspa Swara.
Elburdah, R. P., Pasaribu, V. L. D., Rahayu, S., Septiani, F., & Metarini, R. R. A. (2021). MOMPREENEUR PENOPANG PEREKONOMIAN KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID-19 DENGAN BISNIS ONLINE PADA KELURAHAN PAMULANG BARAT. *Abdi Laksana*:

- Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 75-82.
- Lagiman. (1979). *Industri Kerajinan Bambu*. Yogyakarta: Proyek Penyuluhan Hasil Industry Kerajinan.
- Margono. G. (1992). *Ketrampilan Anyaman Bambu dan Rotan*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Misgiya. (1998). *Upaya Pemanfaatan Potongan-Potongan Bambu Sisa Industri Meubel Bambu Untuk Penciptaan Kerajinan*, Unimed.
- Pasaribu, V. L. D., Agrasadya, A., Shabrina, N., & Krisnaldy, K. (2020). *Menjadi Entrepreneur Muda Yang Memiliki Jiwa Leadership Untuk Menghadapi Masa Depan*. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Rahmana, Arief. (2015). *Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Informasi terdepan tentang Usaha Kecil Menengah*. <http://infoukm.wordpress.com>, diakses pada tanggal 5 Maret 2021)
- Soedarso, SP. (1976). *Proses Pengembangan Desain Produk Dalam Industri Kerajinan*. Diklat. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia "ASRI".
- Sudaryanto, Ragimun. (2011). *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat.
- Tambunan, Tulus. (2009). *UMKM di Indonesia dan Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wihardi, Soedi. J.F.R. (1979). *Catatan Sedehana Anyaman Bambu dan Rotan*. Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik.
- Yamit, Zulian. (2001). *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Yuniarti, K. (2006). *Teknologi budidaya dan pengolahan rotan dan bambu*. Prosiding Ekpose/Diskusi Hasil-Hasil Penelitian. Kupang: Balai Litbang Kehutanan - Nusa Tenggara. <https://www.akseleran.co.id/blog/umkm-adalah/> (diakses tanggal 5 Maret 2021) http://www.software-id.com/central.php?aksi=tutorial_detil&kode=tingkatkan-mutu-produk-jika-tak-tingin-kalah (diakses tanggal 5 Maret 2021) <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62> (diakses tanggal 5 Maret